

ANALISIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MATARAM 2025-2029: PERSPEKTIF PARTISIPATIF DAN TANTANGAN PERKOTAAN

Delfira Rizki Ramdhani¹, Lala Syarifa Aulia², Lalu Muhammad Razif Andhika³, Lulu' Amalia Putri⁴, Muhammad Rinov Ardi Rizqy⁵, Sefira Hayati⁶, Wisnu Hardiyanto Adi Prawira⁷

1234567 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

delfirarizki2@gmail.com

lalaifa6@gmail.com

lalurazif14@gmail.com

luluamelia Putri2005@gmail.com

rinovardirizki@gmail.com

sevirahayati@gmail.com

wisnuhardiyantoadiprawira@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dokumen RPJMD Kota Mataram 2025-2029 dengan fokus pada pendekatan partisipatif dan tantangan perkotaan yang dihadapi dalam implementasinya. Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis, namun juga dibayangi berbagai persoalan seperti urbanisasi cepat, ketimpangan tata ruang, serta keterbatasan layanan publik dasar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan Bappeda serta telaah dokumen resmi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RPJMD telah mengusung visi inklusif melalui prinsip “Mataram HARUM” dan memadukan pendekatan *top-down*, *bottom-up*, serta partisipatif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala—baik dari sisi kapasitas kelembagaan, partisipasi publik yang belum merata, maupun keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, integrasi spasial, serta perencanaan berbasis data dan partisipasi substantif menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Mataram secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: RPJMD; Kota Mataram; Perencanaan Partisipatif; Pembangunan Perkotaan; Evaluasi Kinerja

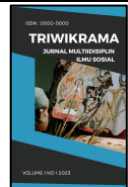
ABSTRACT

This study aims to analyze the 2025-2029 RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan) of Mataram City, focusing on the participatory planning approach and the urban challenges encountered during its implementation. As the capital of West Nusa Tenggara Province, Mataram holds a strategic position but faces various issues such as rapid urbanization, spatial inequality, and limited access to basic public services. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with Bappeda and analysis of official planning documents. The findings reveal that although the RPJMD promotes an inclusive vision through the “Mataram HARUM” principle and integrates top-down, bottom-up, and participatory approaches, its implementation remains constrained by institutional capacity, uneven public participation, and environmental sustainability concerns. Strengthening governance, improving spatial integration, and fostering data-driven and substantive citizen participation are therefore essential to achieving equitable and sustainable urban development.

Keywords: RPJMD; Mataram City; participatory planning; urban development; local governance

1. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang sangat krusial dalam sistem pembangunan daerah. RPJMD dibuat setiap lima tahun oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD berfungsi sebagai acuan kebijakan dan membantu menentukan prioritas program, alokasi anggaran, dan pengukuran



kinerja pembangunan. Dokumen RPJMD untuk Kota Mataram 2025-2029 sangat penting karena kota ini menghadapi banyak tantangan, termasuk ketimpangan pembangunan, peningkatan angka pengangguran, kualitas layanan publik yang buruk, dan ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim (Ibnu, 2024).

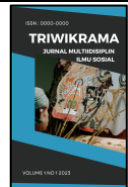
RPJMD menyusun rencana yang komprehensif dengan menetapkan visi "Mataram HARUM (Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri)" dan misi pembangunan yang mencakup peningkatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan tata kelola pemerintahan, ketahanan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, RPJMD sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah berkesinambungan satu sama lain. Perencanaan daerah dapat disesuaikan dengan kebijakan nasional seperti yang diatur dalam INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025 dan Permendagri 86 Tahun 2017, dengan menggunakan dokumen ini. Untuk menghindari tumpang tindih program dan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan penggunaan anggaran (JDIH.Kemendagri.go.id, 2025).

Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram memiliki posisi penting dalam hal kemajuan baik di tingkat lokal maupun nasional. Tempatnya di bagian barat Pulau Lombok membuatnya menjadi pusat interaksi dan konektivitas dari berbagai aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Mataram memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai pusat pemerintahan provinsi untuk menyediakan layanan publik yang baik, menjadi pusat inovasi pembangunan, dan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Kota Mataram adalah pusat ekonomi yang berkembang karena industri jasa, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan dominan. Dengan menjadi pusat aktivitas regional, Mataram memengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. Akibatnya, kemajuan pembangunan Kota Mataram berdampak baik pada warga kota dan wilayah penyangga lainnya yang bergantung pada Mataram sebagai pusat distribusi, layanan, dan bisnis (Mataram, 2024).

Namun demikian, posisi strategis tersebut juga menghadirkan masalah. Dalam Ringkasan Rancangan RPJMD Kota Mataram 2025-2029, beberapa masalah strategis diidentifikasi. Daya saing dan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial-budaya dan lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan adalah beberapa dari masalah tersebut. Meningkatnya laju urbanisasi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Mataram. Urbanisasi yang tidak terkendali memperparah ketimpangan sosial dan meningkatkan kesenjangan akses terhadap layanan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Urbanisasi yang tidak terkendali juga menyebabkan munculnya kawasan kumuh dan meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Selain itu, masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup semakin kompleks. Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), pencemaran lingkungan, dan berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau menempatkan keberlanjutan ekosistem kota di bawah ancaman. RPJMD Mataram dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pengendalian emisi gas rumah kaca sangat penting untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (Saputra et al., 2024). Kota Mataram juga menghadapi masalah ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang lamban dan kurangnya daya saing di sektor-sektor unggulan. Ekonomi kreatif dan pariwisata masih belum mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal, meskipun upaya ini terus dilakukan. Strategi yang lebih terkonsentrasi diperlukan untuk mendorong perekonomian lokal yang inklusif dan berkeadilan, seperti yang ditunjukkan oleh indikator seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio wirausaha di daerah (Anggreni, 2022).

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perencanaan, fokus pembangunan, tantangan, dan solusi yang ditemukan dalam dokumen RPJMD Kota Mataram



tahun 2025-2029. Analisis ini juga penting untuk menilai sejauh mana dokumen RPJMD dapat menangani masalah strategis yang dihadapi Kota Mataram serta bagaimana strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini akan menunjukkan seberapa efektif penggabungan perencanaan teknokratis dan aspiratif. Penelitian juga akan menunjukkan cara dokumen RPJMD digunakan dalam kerangka kebijakan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan masukan strategis untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya untuk Kota Mataram.

Penelitian ini juga merupakan kemajuan dalam ilmu kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada proses pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan (Berita, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori perencanaan partisipatif.

Paradigma perencanaan alternatif yang menggabungkan berbagai kelompok kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan publik disebut perencanaan partisipatif. Paradigma ini memandang perencanaan sebagai forum politik tempat negara dan masyarakat sipil dapat terlibat dalam diskusi atau negosiasi. Perencanaan partisipatif dipromosikan pada tahun 1960-an sebagai alternatif dari perencanaan tradisional, yang dianggap tidak sesuai dengan iklim sosial ekonomi saat itu (Suaib & Si, 2023). Bersama dengan gagasan masyarakat sipil, perencanaan partisipatif telah berkembang secara bertahap. Untuk lebih jelasnya, keyakinan bahwa masyarakat sipil adalah bentuk pemerintahan yang optimal dikaitkan dengan efektivitas perencanaan partisipatif. Ini adalah sikap antara negara dan rakyat, dan mengacu pada arena politik yang terdiri dari asosiasi warga negara. Prasyarat utama untuk perencanaan partisipatif adalah kekuatan umum masyarakat sipil. Teknik perencanaan alternatif, berbeda dengan yang tradisional, mempromosikan pengambilan keputusan publik dengan pemerintah. (Chaowarat, 2010) Dengan membuat rencana lebih peka terhadap berbagai kepentingan, mengurangi korupsi dalam proses perencanaan, dan menciptakan kesepakatan yang akan memungkinkan rencana untuk dilaksanakan, perencanaan partisipatif dikatakan dapat meningkatkan kualitas rencana. Kesesuaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat merupakan kualitas positif yang dapat diharapkan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Menurut de Roux, tujuan utama perencanaan partisipatif adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai pelaku yang memiliki harapan, sudut pandang, dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap masalah dan topik yang sedang dibahas dan dinegosiasikan, daripada untuk mengembangkan rencana. Proses sosial di mana masyarakat harus ikut serta memudahkan untuk menganalisis isu-isu sebagai sebuah kelompok dan untuk menetapkan prioritas berdasarkan kesepakatan yang rumit dan ambigu. Perencanaan harus dipandang sebagai sesuatu yang disengaja, fleksibel, dan berulang. Selain itu, perencanaan memberikan kesempatan khusus bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. (Nierras et al., 2002)

Menurut teori ini, setelah perdebatan, perencanaan dan isinya merupakan tindakan yang telah diputuskan. Percakapan sama pentingnya dengan politik dan teknik dalam perencanaan. Selain bersifat teknis, perencana juga berkomunikasi, yang memengaruhi harapan dan perhatian. (Forester, 1980) Menurut Brooks (2002), paradigma Tindakan Komunikatif memandang



perencanaan sebagai aktivitas interpretatif dan komunikatif yang menunjukkan perencana terlibat dalam jalinan politik, komunitas, dan pengambilan keputusan publik. (Brooks, 2019) Menurut metode ini, anggota komunitas secara aktif menghasilkan pengetahuan untuk bertindak, prinsip tindakan, dan cara bertindak melalui komunikasi satu sama lain pada waktu dan lokasi tertentu; dengan kata lain, komunitas memainkan peran sentral dalam proses perencanaan. Untuk mengakomodasi percakapan yang terjadi dan menjamin bahwa mereka yang terpinggirkan memiliki kesempatan untuk didengar, perencana menjalankan fungsi fasilitator.

Konsep pembangunan berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya, pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mendorong pembangunan yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang (Haqqi et al., 2022). Pembangunan berkelanjutan pada awalnya digambarkan sebagai pembangunan yang memenuhi tuntutan saat ini tanpa membahayakan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam Laporan Brundtland tahun 1987. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan semuanya termasuk dalam paradigma fundamental pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan diperkenalkan selama KTT Bumi Rio de Janeiro 1992, dengan penekanan pada keadaan lingkungan di seluruh dunia. Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia diikuti oleh yang satu ini. Tiga pilar atau aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah penekanan pembangunan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang berusaha mengadopsi pembangunan berkelanjutan saat ini. Dengan memasukkannya ke dalam inisiatif yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengembangkan gagasan ini untuk mekanisme pembangunan negara (Du Pisani, 2006).

Definisi lain tentang pembangunan berkelanjutan adalah bentuk pembangunan di mana pemanfaatan potensi manusia dan sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu aspek dan keseimbangan optimal antara kebutuhan sumber daya yang bersaing merupakan aspek lainnya. Baik kerangka kerja pembangunan lokal maupun global kini sangat bergantung pada gagasan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai pembangunan yang memenuhi tuntutan saat ini tanpa membahayakan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dimensi sosial menekankan nilai keadilan sosial, kesejahteraan yang merata, dan pelestarian budaya; dimensi lingkungan berkonsentrasi pada perlindungan ekosistem, pelestarian sumber daya alam, dan pengurangan dampak perubahan iklim; dan pembangunan ekonomi harus difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif dan merata (Kolbasov, 1992). Dalam kerangka perencanaan regional, penting untuk memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD untuk memastikan bahwa keadilan antargenerasi dan kualitas lingkungan tidak terganggu oleh pertumbuhan perkotaan.

Evaluasi kinerja berbasis indikator (SAKIP, Kaplan & Norton, 1996).

Evaluasi kinerja berbasis indikator merupakan alat penting untuk menilai seberapa baik program pembangunan berjalan dan seberapa baik tujuan yang direncanakan tercapai. Strategi ini menjamin bahwa setiap upaya dan sumber daya yang digunakan dapat dilacak dan memiliki dampak yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kerangka kerja utama yang digunakan di sektor publik Indonesia (*Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*, 2025). SAKIP dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap instansi pemerintah memiliki strategi yang jelas, memiliki tujuan kinerja yang dapat diukur, dan dapat melaporkan pencapaiannya secara terbuka. Menetapkan indikator kinerja SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu) untuk setiap tujuan dan program merupakan landasan SAKIP.



Ini menyiratkan bahwa indikasi untuk program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat mencakup nilai ujian rata-rata atau persentase kenaikan angka pendaftaran sekolah, bukan hanya kuantitas sekolah baru yang dibangun. Untuk menumbuhkan budaya kinerja yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil, SAKIP mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak hanya melaksanakan program tetapi juga menilai dampak dan kemanjurannya secara ketat. (Hendrik Latief et al., 2023) Namun, dibandingkan dengan tinjauan kinerja tradisional, yang sering kali hanya mencakup faktor keuangan, model Balanced Scorecard (BSC), yang pertama kali dipresentasikan oleh Kaplan dan Norton (1996), memberikan sudut pandang yang jauh lebih menyeluruh di bidang manajemen strategis. (Ambhia Widhi, 2024)

Menurut BSC, pengukuran diperlukan dari empat sudut pandang yang saling terkait untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi: 1) Sudut Pandang Keuangan: Menilai kinerja ekonomi dan nilai yang diberikan kepada pemangku kepentingan, termasuk independensi fiskal, pertumbuhan pendapatan daerah, dan efisiensi anggaran. 2) Perspektif Pelanggan (Masyarakat): Menilai kepuasan publik terhadap layanan publik atau, dalam konteks pemerintahan, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indeks kepuasan publik untuk infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan mungkin merupakan salah satu jenis indikator. 3) Mengukur kemanjuran dan efisiensi prosedur operasional yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dari perspektif proses bisnis internal. Ini mungkin melibatkan inovasi proses administratif, lapisan birokrasi, atau durasi layanan perizinan. 4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menilai kemampuan organisasi untuk inovasi, ekspansi, dan kinerja masa depan; sering kali dikaitkan dengan budaya organisasi, teknologi, dan kemampuan sumber daya manusianya. (4) *Perspektif Balanced Scorecard: Memahami Kerangka Kerjanya*, 2024) Tingkat pelatihan personel, penyerapan teknologi baru, dan suasana inovatif dalam pemerintahan adalah beberapa contohnya.

Penilaian yang lebih komprehensif terhadap kinerja suatu entitas, termasuk pemerintah daerah dan penggunaan RPJMD, dimungkinkan oleh metode BSC. BSC mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan elemen-elemen pendukung yang mempengaruhi kinerja jangka panjang selain output, yang merupakan konsekuensi langsung dari kegiatan seperti jumlah jalan yang dibangun, dan outcome, yang merupakan efek jangka menengah dari output seperti berkurangnya kemacetan. (Handayani, 2017) Panjang jalan yang dibangun (output) hanyalah salah satu indikator keberhasilan program pembangunan infrastruktur; indikator lainnya meliputi dampak ekonomi dan sosial jalan (outcome), kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola proyek (proses internal), dan kapasitas pegawai dalam menggunakan sistem yang baru (pembelajaran dan pertumbuhan). Oleh karena itu, penggunaan indikator kinerja yang terukur-baik melalui SAKIP maupun dari sudut pandang BSC-sangat penting untuk menjamin keberhasilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan RPJMD. Hal ini akan menjamin bahwa arah pertumbuhan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan perubahan kebijakan yang diperlukan, dengan tetap menjaga akuntabilitas publik.

Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber : (Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, 2025)

Studi terdahulu tentang evaluasi RPJMD di kota lain (misalnya Surabaya, Bandung, dll)

Meninjau penelitian terdahulu yang relevan sangat penting untuk meningkatkan analisis strategi dan pelaksanaan pembangunan daerah Mataram. Penelitian pertama yang akan ditekankan adalah studi yang berjudul “Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung” ini dilakukan oleh Juventino, Romandio Wildan Darmawan, Nayla Tsabita Putri Pramudito, Danial Ahza Slamet, Felicio Achmadianto Zahra, dan Keisya Willy (Juventino et al., n.d.). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa dekat perencanaan pembangunan Kota Bandung dengan konsep pelibatan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun visi dan tujuan kepala daerah selaras dengan dokumen perencanaan, kolaborasi antarlembaga dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Karena bidang-bidang yang ditekankan sebanding dan menawarkan landasan perbandingan untuk hasil penilaian saat ini, penelitian ini sesuai untuk dijadikan referensi utama.

Studi kedua “Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok” oleh Citra Yulia.(Yuliara, 2020) Berdasarkan indikator pembangunan daerah dan efektivitas pelaksanaannya, studi ini mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa meskipun RPJMD Kota Solok secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan, sejumlah indikator masih belum terpenuhi sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara program yang diprioritaskan dengan kebutuhan masyarakat. Studi ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya menyelaraskan dokumen perencanaan dengan kenyataan di lapangan.

Studi ketiga “Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya 2017-2022” oleh ling Zenal Arifin, Didin Muhafidi, dan Arifah Rosmajudi menyoroti proses penilaian terhadap seberapa baik rencana pembangunan jangka menengah diimplementasikan.(Arifin et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa integrasi yang tidak memadai antar perangkat daerah serta pemantauan dan penilaian internal yang tidak memadai



merupakan penyebab utama implementasi RPJMD yang kurang ideal. Studi ini menunjukkan bahwa kemampuan lembaga pelaksana sama pentingnya dalam proses implementasi seperti halnya dokumen perencanaan yang ditulis dengan baik.

Sudut pandang jangka panjang dalam penilaian perencanaan pembangunan ditawarkan oleh tulisan Kornel Munthe, "Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-2025." Selama periode 20 tahun, penelitian ini mengevaluasi keselarasan RPJPD dengan tujuan tahunan dan jangka menengah. (Munthe, 2023) Ditemukan bahwa RPJPD Kota Medan mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan dalam pemerintahan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan prioritas program. Studi ini sangat penting untuk memahami dampak jangka panjang dari kesinambungan perencanaan terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi literatur tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk menutup kesenjangan pengetahuan mengenai dinamika perencanaan pembangunan di Kota Mataram, sebuah ibu kota provinsi dengan ciri khas urbanisasi yang berbeda. Hanya sedikit studi yang secara menyeluruh mengkaji model perencanaan, penekanan pembangunan, kesulitan, dan solusi dalam RPJMD Kota Mataram, khususnya untuk era 2025-2029 yang akan datang, meskipun banyak studi yang mengkaji RPJMD di kota-kota penting lainnya. Studi ini akan memberikan kontribusi dengan memberikan analisis yang lebih terkini dan kontekstual, termasuk tantangan-tantangan khusus yang berkaitan dengan Kota Mataram, seperti rencana pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tekanan lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi. Selain menambah khazanah pengetahuan tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, studi ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Mataram.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana dan perencanaan pembangunan apa yang dilakukan dalam dokumen RPJMD Kota Mataram 2025-2029. Alasan untuk memilih metode ini adalah bahwa ia dapat menjelaskan bagaimana proses perencanaan pengembangan kontekstual bekerja, terutama dalam menunjukkan bagaimana aktor lokal mengatur visi, misi, dan strategi pengembangan regional partisipatif. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan para peneliti untuk memeriksa berbagai faktor sosial-politik dan teknokratis yang terlibat dalam penciptaan dokumen perencanaan, dan juga untuk memahami pentingnya narasi pembangunan yang disorot oleh pemerintah kota (Wekke, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama yaitu wawancara semi struktur dan studi dokumen. Wawancara semi struktur dilakukan dengan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram yang secara langsung terlibat dalam penyusunan RPJMD (Gill et al., 2008). Wawancara ini bersifat terbuka namun tetap terarah, untuk menggali informasi-informasi mengenai tentang tentang proses perencanaan, pertimbangan strategis, serta keterlibatan aktor-aktor lokal dan masyarakat. Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap berbagai sumber primer seperti dokumen resmi RPJMD Kota Mataram 2025-2029, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta paparan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (parekraf). Data dari dokumen digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan lapangan serta menyediakan gambaran kebijakan yang formal dan tertulis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dan interpretatif. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen, seperti pola partisipasi, arah kebijakan sektoral, dan indikator pembangunan (Nowell et al., 2017). Setelah tema utama dikenali, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung di balik narasi kebijakan, sehingga peneliti dapat memahami dimensi nilai dan asumsi yang melandasi proses



perencanaan tersebut. Kemudian untuk menjaga validitas data agar sah serta valid dilakukanlah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data yang terdapat dalam dokumen resmi. Langkah ini penting untuk memverifikasi konsistensi data dan memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tidak bias dan memiliki dasar empiris yang kuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Perencanaan Pembangunan Kota Mataram

Model perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan penerapan pendekatan yang bersifat kombinitif, yaitu perpaduan antara *top-down*, *bottom-up*, serta partisipatif. Pendekatan *top-down* dalam hal ini merujuk pada arahan-arahan pembangunan dari pemerintah pusat yang bersifat wajib dan menjadi dasar hukum serta operasional bagi pemerintah daerah. Misalnya, bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ditetapkan sebagai prioritas nasional dan harus diintegrasikan ke dalam RPJMD oleh Bappeda Kota Mataram. Hal ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan bagian dari harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah yang menjadi prinsip utama dalam sistem desentralisasi pembangunan di Indonesia (Fatmawati, 2025).

Sementara itu, pendekatan *bottom-up* dijalankan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang berlangsung secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Dalam proses ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan konkret yang mereka hadapi, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas pendidikan, atau pengelolaan sampah di tingkat RT/RW. Aspirasi ini kemudian dikompilasi dan diprioritaskan berdasarkan urgensi, ketersediaan anggaran, dan konsistensi dengan rencana pembangunan jangka panjang (Kabupaten, 2023). Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan sekadar didasarkan pada asumsi teknokratik dari pemerintah.

Selain dua pendekatan tersebut, perencanaan di Kota Mataram juga mencerminkan elemen partisipatif yang melibatkan aktor politik, seperti anggota DPRD melalui jalur aspirasi reses, serta tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam berbagai forum konsultatif. Pendekatan ini memungkinkan adanya representasi berbagai kepentingan yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan pembangunan (SuaraNTB.com, 2025b). Namun, pelaksanaannya tidak luput dari tantangan, seperti dominasi elit lokal, tarik-menarik kepentingan antar sektor, serta keterbatasan kapasitas partisipasi masyarakat yang belum merata.

Model perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam sistem dokumen yang hierarkis dan saling terintegrasi. RPJMD sebagai rencana pembangunan lima tahunan harus merujuk pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang berlaku selama 20 tahun dan menjadi dokumen induk pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak bersifat sporadis dan berganti arah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Visi besar Kota Mataram sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata yang berkualitas menjadi arah pembangunan jangka panjang yang kemudian dirinci ke dalam strategi lima tahunan melalui RPJMD. Dengan demikian, model perencanaan yang digunakan oleh Kota Mataram dapat dinilai cukup komprehensif dalam mengintegrasikan instruksi pusat, kebutuhan lokal, dan partisipasi publik (B. K. Mataram, n.d.).

Fokus Pembangunan dan Program Prioritas

Arah pembangunan Kota Mataram dalam RPJMD 2025-2029 dibingkai dalam sebuah visi besar bernama “Mataram HARUM”, singkatan dari Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri. Visi ini tidak hanya menjadi hiasan retorik dalam dokumen perencanaan, tetapi menjadi dasar



dari keseluruhan program pembangunan lima tahun ke depan. Pemerintah kota menjabarkannya ke dalam lima misi strategis: memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif, menjaga ketahanan wilayah dari bencana serta gangguan sosial, dan terakhir, memastikan infrastruktur serta lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat (NTB, 2025). Misi-misi tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi berbagai tujuan, sasaran, dan indikator yang konkret. Strategi ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya terukur, tetapi juga terarah dan menyeluruh, sesuai dengan prinsip tata kelola kinerja pemerintah daerah yang semakin ditekankan dalam kebijakan nasional (Taufik, 2013).

Di bidang pendidikan, pemerintah kota menyadari bahwa pemerataan kualitas menjadi hal mendesak yang perlu diselesaikan. Tidak sedikit sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota masih menghadapi keterbatasan sarana, guru berkualitas, dan akses teknologi. Untuk itu, kebijakan rotasi atau *tour of duty* guru antar sekolah diterapkan guna menekan kesenjangan kualitas antarsekolah. Selain itu, penguatan pendidikan karakter juga menjadi perhatian. Pemerintah kota menggagas aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah dasar, serta memperkenalkan kembali nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu perjuangan setiap pekan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Mataram tidak hanya mengejar aspek akademik, tetapi juga berupaya membentuk siswa yang berakarakter dan cinta tanah air. Pendekatan seperti ini sejalan dengan gagasan UNESCO (Unesco, 2015) tentang pentingnya pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga nilai dan tanggung jawab sosial.

Di sektor kesehatan, fokus utama RPJMD adalah memastikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan dapat diakses oleh semua kalangan. Pemerintah kota menargetkan seluruh fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu, mendapatkan akreditasi nasional, agar standar pelayanannya meningkat dan seragam. Inovasi seperti program “Jas Kuning” (Jalan Sehat Kunjungi Lingkungan) merupakan contoh nyata upaya mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat dengan cara yang sederhana namun efektif. Layanan kesehatan jiwa juga menjadi perhatian baru, seiring meningkatnya tekanan mental masyarakat perkotaan—terutama remaja, ibu rumah tangga, dan lansia. Dengan memperluas layanan konseling psikologis hingga ke tingkat puskesmas, Kota Mataram mencoba menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam kesehatan mental (SuaraNTB.com, 2025a).

Sektor ekonomi dan pariwisata juga tidak luput dari sorotan. Kota Mataram mendorong pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, dengan branding sebagai “Kota UMKM Kuliner”. Pemerintah daerah tidak hanya membantu dari sisi pelatihan dan perizinan, tetapi juga mendorong digitalisasi usaha lewat pelatihan e-commerce, pemasaran daring, hingga pameran produk kreatif. Bersamaan dengan itu, sektor pariwisata diarahkan untuk tidak lagi sekadar mengejar jumlah kunjungan, tetapi fokus pada kualitas pengalaman wisatawan. Segmen wisatawan premium dan generasi muda menjadi target utama, melalui pendekatan berbasis event, kampanye media sosial, serta penyelenggaraan festival kreatif. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *sustainable tourism*, yaitu pengembangan wisata yang tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menjaga lingkungan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal (Hamdi, 2024).

Terakhir, dari sisi pembangunan fisik, Kota Mataram ingin memastikan bahwa pertumbuhan kotanya berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Pemerintah merencanakan pembangunan rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah, memperluas ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota, dan memperbarui layanan publik menggunakan teknologi digital. Infrastruktur sosial seperti taman kota, sentra UMKM, dan ruang terbuka komunitas juga dikembangkan untuk memperkuat interaksi warga dan kohesi sosial. Selain itu, kesadaran akan pentingnya lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu



(TPST), promosi energi bersih, dan edukasi lingkungan di tingkat sekolah hingga RT. Semua program tersebut ditargetkan mampu mendorong capaian makro seperti peningkatan IPM menjadi 84, pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menjadi 6,92%, dan perbaikan ketimpangan ekonomi melalui Gini Ratio sebesar 0,376 hingga tahun 2030 (B. K. Mataram, n.d.).

Secara umum, apa yang terlihat dalam dokumen RPJMD Kota Mataram bukan hanya daftar panjang proyek pembangunan, tetapi sebuah kerangka kerja yang mempertemukan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah kota mencoba menghindari jebakan pembangunan yang hanya fokus pada infrastruktur fisik tanpa memperhatikan kebutuhan warga yang paling dasar. Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan multidimensi ini, pembangunan Kota Mataram diarahkan untuk benar-benar menciptakan kota yang tidak hanya berkembang, tetapi juga bisa dirasakan keadilannya oleh semua warganya—sejalan dengan prinsip *inclusive and resilient urban governance* yang menjadi praktik baik di banyak kota dunia saat ini (Rahmadi et al., n.d.).

Tantangan Perkotaan dan Isu Strategis

Kota Mataram menghadapi kesulitan yang signifikan karena pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak merata yang melebihi kemampuan kota untuk mengakomodasi populasinya. Pindah dari pedesaan dan pulau-pulau yang jauh ke Mataram menambah ketegangan ekstra pada kemampuan alam untuk mendukung kehidupan, fasilitas penting, dan layanan masyarakat. Kurangnya kesiapan dalam infrastruktur untuk mengakomodasi lonjakan pertumbuhan kota mengarah pada masalah-masalah seperti kemacetan lalu lintas, pengurangan area hijau terbuka, dan perluasan zona perumahan yang tidak diatur. Kota ini menghadapi tekanan besar untuk mengubah penggunaan lahan dari daerah alami ke daerah yang dibangun, terutama di daerah Fringe City yang dulunya adalah pusat pertanian.

Wilayah yang langka adalah penyebab banyak masalah kota yang ditemui Mataram saat ini. Perubahan cepat dan spontan dari penggunaan lahan mengurangi ruang untuk membangun fasilitas publik dan area hijau terbuka. Penelitian oleh Sanapiah (Sanapiah & Mataram, 2023) menunjukkan bahwa area penghijauan di Mataram tidak memenuhi standar yang disarankan yang ditetapkan oleh undang-undang perencanaan spasial, yang menunjukkan minimal 7%. Ini memengaruhi kebersihan lingkungan kota dan kemampuannya untuk menyerap hujan, yang meningkatkan peluang banjir tahunan. Di sisi lain, pembangunan perumahan informal di tanah yang tidak dapat dihuni, seperti perbatasan sungai dan pantai, semakin meningkatkan kerentanan orang miskin terhadap bencana alam.

Masalah dengan penyelesaian cepat ditunjukkan oleh semakin banyak kumuh dan kekurangan perumahan yang terus semakin besar. Rumah-rumah yang tidak cukup terjangkau adalah masalah mendasar yang menghalangi kesejahteraan penduduk kota. Skenario ini diperburuk oleh sistem pembuangan limbah yang tidak memadai yang hanya dapat melayani daerah tertentu, terutama di daerah yang ramai. Drainase yang buruk menyebabkan banjir musiman, dan kadang-kadang menyebabkan banjir di berbagai lingkungan.

Mengawasi area publik seperti taman dan jalan setapak juga tidak efektif, baik dalam hal jumlah maupun standar, yang membuat kota merasa tidak ramah dan kurang ramah untuk kelompok yang rentan seperti anak-anak, yang berusia, dan bersamaan dengan masalah fisik dan spasial, perbedaan ekonomi adalah aspek penting dari kesulitan yang sama pentingnya. Pinggiran menampilkan keterlambatan dalam memperoleh sekolah yang baik, layanan medis yang memadai, dan prospek kerja yang menguntungkan. Kesenjangan layanan mendasar ini memperluas perpecahan sosial dan meningkatkan peluang sengketa berdamai di tingkat masyarakat. Penelitian oleh Ratni et al., (2025) menunjukkan bahwa penghuni wilayah pinggiran Mataram menganggap kurangnya fokus dalam strategi pengembangan kota. Dalam ranah pertumbuhan



inklusif, kejadian ini adalah peringatan penting yang menyerukan pemeriksaan menyeluruh dari strategi yang lebih berwibawa dari atas dan kurang melibatkan.

Tantangan yang tidak kalah besar berasal dari aspek lingkungan global, terutama dampak perubahan iklim. Sebagai kota tepi laut, Mataram sangat rentan terhadap peningkatan kadar laut, penetrasi air asin, dan genangan pasang surut yang secara bertahap tetapi jelas membahayakan fasilitas perumahan dan garis pantai. Akhir-akhir ini, peristiwa cuaca yang parah menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah bahaya aktif, bukan risiko tersembunyi, dan menuntut perubahan kebijakan yang terorganisir. (Rustam et al., 2023) mencatat bahwa beberapa komunitas di Mataram telah melakukan upaya adaptif berbasis lokal, tetapi skala dan dampaknya tidak cukup untuk menjawab jumlah tantangan iklim. Kota Mataram membutuhkan pendekatan yang lebih terorganisir dan bersatu untuk pencegahan bencana dan penyesuaian iklim dalam dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD.

Strategi Pemerintah dalam Menjawab Tantangan

Administrasi Kota Mataram menangani masalah kota dengan strategi yang disatukan, fleksibel, dan didorong informasi. Meningkatkan kontrol spasial adalah prioritas pertama untuk merestrukturisasi perencanaan kota lebih solid dan adil. Pembaruan RTRW dan RDTR berfungsi sebagai fondasi hukum untuk mencegah perubahan lahan dan menentukan batas-batas aplikasi spasial, terutama di daerah yang rentan terhadap sengketa spasial. Administrasi berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan kelompok non-militer dalam melakukan tinjauan spasial bersama, untuk menjamin bahwa setiap modifikasi dalam distribusi tanah memperhitungkan masalah lingkungan dan masyarakat secara adil.

Untuk menyelesaikan masalah perumahan, pendekatan utama melibatkan perolehan apartemen sewaan (Rusunawa) yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Metode tegak ini dipilih untuk mengatasi pembatasan ruang dan untuk menggabungkan ruang hidup dengan layanan dukungan masyarakat mendasar. Inisiatif Rusunawa bertujuan untuk membantu penduduk perkotaan berpenghasilan rendah yang tinggal di pemukiman dan daerah penghuni liar yang rentan terhadap bencana alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk dengan menyediakan layanan dan infrastruktur penting, seperti pasokan air, pengelolaan limbah, dan fasilitas kesehatan.

Dalam perawatan sosial, administrasi memperluas ketersediaan layanan kesehatan dengan meremajakan Posyandu dan memulai program kesehatan mental lokal. Rencana ini dibuat setelah peningkatan masalah kesehatan mental setelah pandemi yang mempengaruhi kelompok usia kerja dan remaja. Petugas kesehatan dan kelompok masyarakat setempat bekerja sama untuk meningkatkan identifikasi cepat dan proses rujukan yang cepat di desa-desa. Gagasan baru ini diantisipasi untuk mengatasi kurangnya dukungan mental dan sosial di tingkat perawatan kesehatan dasar, yang telah dikelola secara tidak konsisten. Selain itu, digitalisasi layanan kesehatan berbasis aplikasi juga diuji untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Pengaturan jaringan transit dan area komunal juga merupakan elemen penting dari rencana pertumbuhan. Administrasi memprakarsai jaringan transit massal yang berfokus pada transit yang menghubungkan pusat kota dengan perumahan pinggiran kota, di samping memperluas jalan-jalan ramah lingkungan dan memperbaiki trotoar untuk kenyamanan walker. Gagasan daerah perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan dicapai dengan membangun taman kota serba guna yang berfungsi sebagai area alami dan pusat acara lokal.

Muladi et al., (2024) menunjukkan bahwa meningkatkan taman umum dapat meningkatkan kegembiraan kota dan mengurangi ketegangan mental pada penghuni kota. Pengawasan lingkungan berubah menjadi hubungan penting untuk rencana ramah lingkungan jangka menengah. Pihak berwenang meningkatkan inisiatif penanganan sampah pengurangan-siklus-siklus (TPS3R) yang berfokus pada lingkungan, didukung oleh pelatihan dan penghargaan untuk



pengawas lingkungan. Perangkat lunak ini tidak hanya sebagai perbaikan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk peningkatan sosial dan keuangan orang. Dalam menangani efek pemanasan global, menciptakan taman dan membangun struktur ramah lingkungan seperti biopori dan sumur air adalah penting. Pihak berwenang bertujuan untuk meningkatkan penghijauan perkotaan sebesar 15% dalam lima tahun ke depan, menunjukkan dedikasi mereka terhadap kesehatan lingkungan kota metropolitan. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menanggapi situasi, tetapi juga mulai menciptakan basis yang kuat dan berpikiran maju untuk pertumbuhan.

Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu menjalankan tugasnya secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Di Kota Mataram, SAKIP menjadi kerangka utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah secara terukur, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi. Seiring waktu, penerapan SAKIP di Kota Mataram menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, nilai SAKIP masih berada pada kategori CC dengan skor 58,1. Namun, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Mataram berhasil meningkatkan nilainya menjadi 63,13 dan memperoleh predikat B, yang terus dipertahankan hingga tahun 2020 dengan skor 65,76. Pada evaluasi tahun 2021, skor tersebut meningkat menjadi 66,62, dan akhirnya pada tahun 2022, Kota Mataram berhasil meraih predikat BB dari Kementerian PANRB Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Mataram dari Menteri PANRB, Azwar Anas, dalam acara Penghargaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta. Predikat BB menunjukkan keberhasilan Kota Mataram dalam mengelola lima komponen utama siklus SAKIP, yakni perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian hasil. Capaian ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan menjadi bukti bahwa arah pembangunan Kota Mataram berada pada jalur yang tepat, dengan tata kelola yang semakin kuat dan sistematis, serta komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat. (Rifa'id et al., 2022).

Dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Mataram, tidak hanya visi dan misi daerah yang menjadi acuan utama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual daerah serta kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Evaluasi terhadap kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target-target yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan.

a. Sasaran Program: Meningkatkan rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD pada unit-unit kerja yang berada di bawah koordinasi Bidang Ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya adalah persentase perangkat daerah di bawah koordinasi Bidang Ekonomi yang memiliki kinerja dengan kategori baik dan sangat baik. Pada tahun 2020, target indikator ini ditetapkan sebesar 95%, namun realisasinya mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaiannya tercatat sebesar 105,26%. Capaian ini diperoleh melalui rumus: $(\text{jumlah perangkat daerah dengan kinerja baik dan sangat baik} \div \text{total perangkat daerah yang dikoordinasikan dalam bidang ekonomi}) \times 100\%$. Dalam hal ini, dari total 5 perangkat daerah yang termasuk dalam koordinasi Bidang Ekonomi, seluruhnya atau 5 SKPD menunjukkan kinerja dengan kategori baik dan sangat baik.

b. Sasaran Program: Meningkatkan rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD pada perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Bidang Sosial Budaya. Indikator



keberhasilannya diukur melalui persentase perangkat daerah di bidang tersebut yang mencapai kinerja dengan kategori baik dan sangat baik. Pada tahun pelaksanaan, target yang ditetapkan sebesar 95%, namun realisasi yang dicapai mencapai 93,75%, dengan tingkat pencapaian sebesar 98,68%. Angka ini dihitung menggunakan rumus: $(\text{jumlah perangkat daerah dengan kinerja baik dan sangat baik} \div \text{total perangkat daerah yang dikoordinasikan dalam Bidang Sosial Budaya}) \times 100\%$. Berdasarkan data, sebanyak 10 SKPD dan 5 kecamatan menunjukkan kinerja baik dan sangat baik, dari total 10 SKPD dan 6 kecamatan yang berada di bawah koordinasi Bidang Sosial Budaya..

c. *Sasaran Program*: Program ini ditujukan untuk meningkatkan rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya adalah persentase perangkat daerah dalam bidang tersebut yang menunjukkan kinerja dengan kategori baik dan sangat baik. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 95%, namun realisasi yang dicapai berada pada angka 84%, dengan tingkat capaian sebesar 88,42%. Angka realisasi ini dihitung menggunakan rumus: $(\text{jumlah perangkat daerah dengan kinerja baik dan sangat baik} \div \text{total perangkat daerah yang dikoordinasikan dalam Bidang Prasarana Wilayah dan SDA}) \times 100\%$. Berdasarkan data, terdapat 21 perangkat daerah yang mencapai kinerja baik dan sangat baik dari total 25 perangkat daerah yang termasuk dalam koordinasi bidang ini.

Secara umum, hasil evaluasi dari tiga domain pembangunan utama menunjukkan bahwa dua di antaranya memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan. Ini adalah hasil dari perencanaan yang terarah, pelaksanaan program yang cukup baik, dan koordinasi yang sangat baik antarperangkat daerah terkait. Situasi ini menunjukkan keberhasilan awal dalam menerapkan kebijakan pembangunan lokal yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Mataram. Sebaliknya, ada satu bidang yang kinerjanya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan menjalankan program dan koordinasi antarunit pelaksana. Pentingnya pencapaian ini karena dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan regional secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi capaian kinerja ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif program pembangunan. Ini juga berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan strategi perbaikan yang lebih fleksibel, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Bagian penting dari sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah di Mataram adalah evaluasi berkala semesteran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Evaluasi ini dilakukan dua kali setahun dan bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama evaluasi ini adalah untuk melacak kinerja pembangunan, khususnya pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan pada program dan kegiatan. Selain itu, Bappeda berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Rahmania et al., 2024).

Untuk melaksanakannya, Bappeda Kota Mataram melibatkan berbagai pihak, termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui rapat koordinasi dan diskusi lanjutan tentang hasil evaluasi. Salah satu alat penting yang digunakan dalam evaluasi ini adalah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Penilaian juga mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan tepat sasaran dan efisien. Hasil evaluasi semesteran menunjukkan pencapaian kinerja pembangunan Kota Mataram yang sangat baik. Sebagian besar



indikator kinerja utama berhasil mencapai target, dengan rata-rata capaian sekitar 95%. Hasil evaluasi juga mendorong perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar lebih sesuai dengan perubahan yang terjadi di sekitar kota dan kebutuhan masyarakat. (Daerah, 2016)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram adalah laporan yang menunjukkan kinerja Bappeda selama satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah LKjIP. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat pemerintahan menjadi akuntabel dan dapat diukur. Untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai, evaluasi pelaksanaan RPJPD menjadi penting seiring berjalannya waktu. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai seberapa jauh sasaran utama pembangunan daerah telah dicapai, menemukan hambatan yang dihadapi, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan untuk masa depan. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan sukses.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi RPJMD dilakukan dalam jangka waktu lima tahun untuk mengevaluasi keberhasilan, efisiensi, dan relevansi program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah yang terpilih. Oleh karena itu, evaluasi RPJMD yang menyeluruh sangat penting untuk menilai seberapa baik tujuan pembangunan daerah dicapai. Perencanaan pembangunan lima tahun mendatang telah dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD daerah oleh bappeda untuk meninjau. Untuk memenuhi rencana lima tahun, bappeda telah menetapkan langkah-langkah yang disusun setiap tahun untuk memastikan bahwa rencana rencana strategis yang direncanakan berjalan sesuai harapan. Rennja (Renara Kerja) termasuk dalam Rencana Strategis, jadi ada banyak program tahunan di Rennja. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah rencana perencanaan yang akan berlangsung selama dua puluh tahun dan mencakup visi, misi, dan rencana pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. RPJMD kota Mataram harus menyampaikan visi dan misi dan program kepala daerah dalam empat tahap rencana pembangunan, seperti RPJP daerah dan RPJM nasional. penelitian pembangunan lima tahun nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Analisis hasil Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif. Analisis dilakukan melalui penilaian realisasi DPA-SKPD untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD mencapai visi, misi, dan sasaran Renja SKPD, serta untuk memastikan bahwa penyerapan dana dan kendala yang dihadapi telah dipenuhi. Hasil Renja SKPD dievaluasi oleh kepala SKPD. Jika ada ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala SKPD melakukan perbaikan atau penyempurnaan dan menjadi bahan untuk penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya. Setiap triwulan dalam tahun anggaran tertentu, kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja SKPD kepada Bupati melalui kepala Bappeda. Kepala Bappeda juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan tersebut. Jika ada ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati akan memberikan rekomendasi kepada kepala Bappeda dan langkah-langkah penyempurnaan akan dilakukan oleh kepala SKPD. Hasil tindak lanjut penyempurnaan dan perbaikan disampaikan kepada bupati melalui kepala Bappeda oleh kepala SKPD. Konsistensi ketiga dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, PPAS, dan APBD) dapat digunakan untuk menentukan seberapa konsisten Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam memenuhi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat saat mengatur anggaran (Roehaenah, 2019).



Transparansi merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Setiap warga desa dapat dengan mudah mengakses informasi tentang rencana pembangunan, anggaran, dan pengambilan keputusan karena proses ini transparan. Ini memungkinkan warga memahami bagaimana keputusan dibuat dan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat terjadi jika tidak ada transparansi, menghambat pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas sama pentingnya. Akuntabilitas memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan keputusan yang mereka ambil. Warga desa dapat menuntut pemimpin dan pejabat desa untuk bertanggung jawab ketika ada akuntabilitas. Hal ini menciptakan suasana di mana semua orang merasa harus melakukan yang terbaik untuk kemajuan desa. Perencanaan pembangunan dapat menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika tidak ada akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sama pentingnya. Akuntabilitas memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Ketika orang bertanggung jawab, warga desa dapat menuntut pemimpin dan pejabat. Hal ini menyebabkan semua orang bersemangat untuk melakukan yang terbaik untuk kemajuan desa. Perencanaan pembangunan tanpa akuntabilitas dapat menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres 29/2014), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kumpulan aktivitas, alat, dan prosedur yang sistematis yang dimaksudkan untuk menentukan dan mengukur kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja mereka kepada lembaga negara dan organisasi lainnya (Sinaga, 2024). Selain itu, LAKIP Bappeda harus menjelaskan bagaimana Pengarusutamaan Gender diterapkan pada OPD Bappeda Kota Mataram, yang termasuk beberapa sub kegiatan yang sudah berbasis gender. Perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten adalah tanggung jawab utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Karena tanggung jawab utama ini, BAPPEDA Kota Mataram memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. BAPPEDA Kota Mataram harus mampu melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi tugas utamanya dan meyakinkan masyarakat Kota Mataram dalam hal perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk memenuhi tuntutan publik, Bappeda Kota Mataram akan menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tujuan utama adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau pemimpin yang baik sehingga pembangunan dan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Mataram, menerapkan transparansi dan akuntabilitas membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Bappeda dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah efektif, efisien, dan menguntungkan masyarakat dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perencanaan RPJMD untuk pembangunan Kota Mataram dari tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan strategi top-down, bottom-up, dan partisipasi publik.



"Mataram HARUM" adalah landasan pembangunan yang berfokus pada sumber daya manusia yang baik, pemerataan ekonomi, tata kelola pemerintah yang baik, ketahanan sosial dan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif perlu diterapkan untuk menangani masalah seperti ketimpangan sosial, masalah lingkungan hidup, dan urbanisasi. Evaluasi kinerja yang berkelanjutan dari mekanisme seperti SAKIP telah menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan di daerah lebih efektif.

Saran

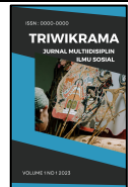
- Perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan agar lebih efektif dan transparan.
- Mengintegrasikan program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam setiap kebijakan pembangunan.
- Meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah untuk memastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik dan saling mendukung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- 4 *Perspektif Balanced Scorecard: Memahami Kerangka Kerjanya*. (2024). Proxis Consulting.
- Ambhia Widhi. (2024). *Balanced Scorecard: Definisi, Konsep dan Perspektifnya*. Mekari Jurnal.
- Anggreni, N. L. E. Y. (2022). Sampah Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Kreatif Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Mataram. *Guna Sewaka*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.53977/jgs.v1i2.469>
- Arifin, I. Z., Muhafidi, D., & Rosmajudi, A. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 1-7.
- Berita, S. (2025). *Perencanaan pembangunan daerah mengacu pada visi indonesia emas 2045*. 1-5.
- Brooks, M. (2019). *Planning theory for practitioners*. Routledge.
- Chaowarat, P. (2010). Participatory planning in municipal development in Thailand. *Berlin: Technische Universität Berlin*.
- Du Pisani, J. A. (2006). Sustainable development - historical roots of the concept. *Environmental Sciences*, 3(2), 83-96. <https://doi.org/10.1080/15693430600688831>
- Fatmawati, R. (2025). *Konsultasi Publik RPJMD Kota Mataram 2025-2029 Menyerap Aspirasi*. <https://rri.co.id/mataram/daerah/1409623/konsultasi-publik-rpjmd-kota-mataram-2025-2029-menyerp-aspirasi>
- Forester, J. (1980). Critical theory and planning practice. *Journal of the American Planning Association*, 46(3), 275-286.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291-295.
- Hamdi, S. (2024). *Strategi Pengembangan SDM pada UMKM Kuliner di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. 2(3), 1-9.
- Handayani, S. (2017). Analisis Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Kinerja Perusahaan Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i3.110>
- Haqqi, M. M., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). *Konsep pembangunan berkelanjutan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional*. 31(1), 11-28.



- Hendrik Latief, Syachrumsyah Asri, & Agus Santosa. (2023). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Paser. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367-1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Juventino, R. W., Darmawan, N. T. P., Pramudito, D. A., Slamet, F. A., & Zahra, K. W. (n.d.). *Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung*. Kabupaten, B. (2023). *MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN, PENDEKATAN BOTTOM UP PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024*. <https://bappeda.jembranakab.go.id/index.php/2023/02/27/musrenbang-rkpd-di-kecamatan-pendekatan-bottom-up-perencanaan-pembangunan-tahun-2024/>
- Kolbasov, O. S. (1992). UN conference on environment and development. *Izv.-Akad. Nauk. Seriya Geogr*, 6, 47-54.
- Mataram, B. K. (n.d.). *RJPMD Kota Mataram 2024*.
- Mataram, U. (2024). *Smart Economy Untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Mataram*. 10(1), 1-20.
- Muladi, A., Adiansyah, J. S., & Johari, H. I. (2024). *Environmental Services on the Public Green Open Space using Dpsir Approach: Study Case at Mataram City*. 22(3), 771-780. <https://doi.org/10.14710/jil.22.3.771-780>
- Munthe, K. (2023). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-2025. *KAIZEN: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 55-63.
- Nierras, R. M., Bishop, E., Abao, C., & Rose-Millianos, K. (2002). Making participatory planning in local governance happen. *Institute of Development Studies University of Sussex*.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847.
- NTB, A. (2025). *Gubernur Iqbal: Musrenbang NTB fokus pada tiga sektor*. <https://mataram.antaranews.com/berita/458953/gubernur-iqbal-musrenbang-ntb-fokus-pada-tiga-sektor>
- Rahmadi, T., Pakar, D., & Bidang, G. S. N. (n.d.). *Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kota mataram*.
- Rahmania, N., Andika, M., Febrianti, I., & Mustamin, M. (2024). Optimalisasi Kegiatan Musrembang Dalam Meningkatkan Perencanaan Partisipatif Di Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(3), 851-857.
- Ratni, N., Purnamasari, W. D., & Sasongko, W. (2025). *Preferensi bermukim penghuni perumahan formal di kawasan*. 9(0341), 171-180.
- Rifaid, R., Wahyu, N., & Jafar, M. U. A. (2022). Mengukur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(2), 135-144.
- Roehaenah, R. (2019). *Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu*.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., & Anam, S. (2023). *Climate Change Adaptation Assistance to a Number of Environmental Communities in Mataram City in Supporting NTB ' s Commitment to Net Zero Emission Pendampingan Adaptasi Perubahan Iklim pada Sejumlah Komunitas Lingkungan di Kota Mataram dalam Mendukung Komitmen NTB Menuju Net Zero Emission*.
- Sanapiah, M. A. D., & Mataram, U. M. (2023). *Evaluasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Mataram*.
- Saputra, H. Y., Syah, N., Dewata, I., Razak, A., Diliarosta, S., & Azhar, A. (2024). *Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Lingkungan : Literatur Review*. 2, 920-926.
- Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam program kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 36-43.
- Suaib, D., & Si, M. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023*.



- SuaraNTB.com. (2025a). *Pemprov NTB Siap Gelar Musrenbang RPJMD 2025 - 2029 dan RKPD 2026*.
https://suarantb.com/2025/05/28/pemprov-ntb-siap-gelar-musrenbang-rpjmd-2025-2029-dan-rkpd-2026/#google_vignette
- SuaraNTB.com. (2025b). *Rencana Transportasi Publik Mataram Disusun Secara Partisipatif*.
<https://suarantb.com/2025/05/19/rencana-transportasi-publik-mataram-disusun-secara-partisipatif/#:~:text=Rencana Transportasi Publik Mataram Disusun Secara Partisipatif,Kesehatan Jemaah Haji Kota Mataram Relatif Stabil>
- Taufik, T. (2013). Peran monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 1(2), 199-212.
- Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. (2025). 2025.
- Unesco, E. S. D. (2015). *Global action programme on education for sustainable development information folder*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku CV. Adi Karya Mandiri).
- Yuliara, C. (2020). *Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok*. Universitas Andalas.